

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press .
- Adjie, H. (2013). *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya, Edisi Revisi*. Surabaya: BHP Surabaya.
- Adjie, H. (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. II*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2013). *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Afandi, A. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Al Shobuni, M. A. (2010). *Al Mawaariitsu fii Al Syarii' Al Islamiyyah*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyyah.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Amanat, A. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andasmita, K. (1987). *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*. Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat.
- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asri, B. A. (1988). *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito .
- BIP, R. (2017). *Undang Undang Republik Indonesia (Undang Undang Perkawinan)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer .
- Boediarto, M. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Perangin, E. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Pitlo, A. (1994). Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]. Dalam M. I. Arief. Jakarta: Intermedia.
- Pratiwi, S. M. (2014). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar*.
- Prodjodikoro, W. (2008). *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA*. BANDUNG : PT REFIKA ADITAMA .
- utranto, N. (2013). *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*. Surabaya : Balai Harta Peninggalan Surabaya.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sarjita, H. B. (2005). *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Soerjopratiyo, H. (1982). *Hukum Waris Tanpa Wasiat* . Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, . Surabaya: Arkola.
- Subekti. (1996). *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXVIII*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sunggono, B. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, A. d. (1986). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- Trianto, T. T. (2007). *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Permen ATR/Kepala BPN 16/2021

Staatsblad 1917 No. 129

JURNAL

Agustina, M. S. (2021). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 224.

Amalia, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 394/PK/PDT/2015). *Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol 1, No. 1.

Fikricinta, N. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby) . *Indonesian Notary Vol. 3 No. 2* .

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, e. a. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 2* .

Mahmurodhi. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, Hukum dan Keadilan . *Jurnal Ilmiah hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2*.

Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, Vol. III, No. 3*.

S, Wijaya. M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2*.

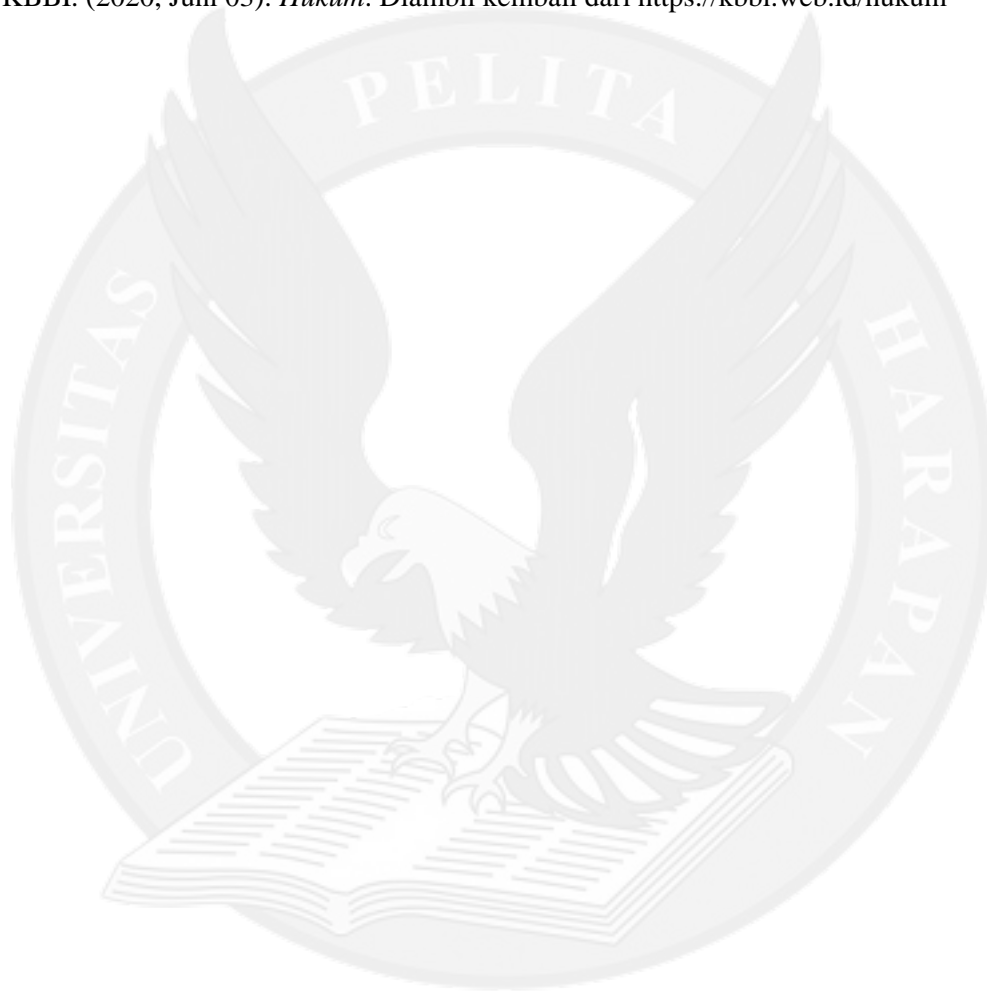
Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 5 No.1*.

Sunaryo, M. G. (2018). Pembatalan Surat Wasiat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 Kuhperdata . *Lex Privatu Vol. VI, No. 2*.

WEBSITE

Justika. (2022, juni 13). *Cara Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Beserta Contohnya*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-surat-keterangan-ahli-waris-beserta-contohnya-lt620a162c10619>

KBBI. (2020, Juni 03). *Hukum*. Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/hukum>



LAMPIRAN

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn

